

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Isu lingkungan telah menampakkan kenaikan level menjadi isu yang serius dan bersifat *high politics*. "Kita dapat melihat bahwa setiap hari dan dimana-mana polusi meningkat pesat di bumi baik itu polusi udara, tanah, air, penggundulan hutan, hujan asam dan bencana berbahaya lainnya yang diciptakan oleh manusia melalui kemajuan teknologi" (Pant, Verma and Surya, 2020).

Masalah lingkungan yang kian intens terjadi yakni yang pertama adalah pemanasan global yang merupakan peningkatan luar biasa dalam suhu rata-rata bumi selama abad terakhir terutama karena gas rumah kaca yang dilepaskan dari penggunaan bahan bakar fosil. Salah satu efek pemanasan global adalah peningkatan terhadap suhu di Kutub Utara dan mengakibatkan es mencair. Kedua, terjadinya peningkatan konsentrasi gas karbon di atmosfer yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, solar dan batubara. Ketiga, terjadinya fenomena hujan asam seperti hujan, salju, kabut dan debu yang bersifat asam yang disebabkan oleh emisi gas nitrogen oksida yang bereaksi dengan molekul air di atmosfer untuk menghasilkan asam dan memiliki efek berbahaya pada tanaman, hewan dan infrastruktur. Keempat, penipisan lapisan Ozon yang berakibat bahaya dimana manusia akan langsung terkena radiasi ultraviolet yang berbahaya dari matahari (Pant, Verma and Surya, 2020). Dilihat dari beberapa dampak perubahan lingkungan maka Isu lingkungan tidak lagi dipandang sebagai isu *low politics*.

Isu lingkungan telah menjadi isu yang melampaui lintas batas sebab dipengaruhi oleh sumberdaya yang ada bergerak tidak hanya pada suatu negara saja. Siklus air dalam hal ini aktivitas laut merupakan media polutan relatif mudah menular. Sebagaimana dinyatakan Dewi Surinati, Laut memiliki peranan yang sangat penting dalam mengontrol iklim

dibumi dengan memindahkan panas dari daerah ekuator menuju ke kutub (Surinati, 2013). Aktivitas laut merupakan media polutan relatif mudah menular diikuti dengan berlanjutnya arus globalisasi serta proses aktivitas bumi yang kian meningkat mengubah masalah lokal menjadi masalah internasional menyebabkan perubahan iklim secara global dapat dengan mudah terjadi. Oleh sebab itu isu lingkungan telah menjadi isu yang kian rentan dan bersifat *high politics*.

Perubahan Iklim Global yang ekstrim tidak dapat dielakkan oleh dunia khususnya wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti kawasan Kepulauan pasifik salah satunya ialah negara Tuvalu. Tuvalu telah menjadi sorotan Internasional lantas statusnya sebagai negara yang telah berada di garda depan ancaman perubahan iklim global. Diketahui Tuvalu memiliki daratan yang sangat rendah dan rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. Ketinggian Tuvalu diatas permukaan air laut kurang dari 5 meter sedangkan air laut di kawasan ini kian naik sekitar 0,5 cm per tahun sehingga menjadikan Tuvalu menjadi negara yang sangat rentan terhadap badai siklon torpis (Programme and Countries, 2019).

Menyadari fenomena tersebut mengancam keamanan bangsa, Tuvalu terus memperbaharui kebijakan di sektor energi dan mengambil tindakan untuk mengurangi impor bahan bakar fosil untuk mengurangi neraca pembayaran dan mengurangi jejak karbon sebagai upaya mengubah sektor energinya menjadi sumber non-karbon (Government of Tuvalu, 2015). Hal ini bertujuan untuk mengurangi sumbangsih emisi Gas Rumah Kaca (GRK) meskipun Tuvalu dikenal sebagai negara yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil sebagai kebutuhan energi mereka. Tuvalu berkomitmen mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan seperti menggunakan minyak kelapa sebagai bahan utama dalam penggunaan listrik dan transportasi, dan Biogas dari hewan dan manusia sebagai bahan utama dalam penggunaan gas memasak dan pupuk (Statesand Nations,2003).

Namun upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri sehingga dalam mendukung ambisinya, Tuvalu membutuhkan Kerjasama Internasional yang diupayakan melalui Diplomasi Lingkungan. Diplomasi merupakan sarana manajemen hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Melalui perwakilan resmi yang dipercayakan kepada Negosiator atau Diplomat untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional yang dilakukan melalui korespondensi, lobby, dan aktivitas terkait. Diplomasi merupakan metode untuk membawa kepentingan negara menyangkut ekonomi, politik, sosial, lingkungan dan kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional guna mencapai pengertian, persetujuan, dan kerja sama antar negara mitra secara bilateral maupun multilateral (Nurafky, 2013).

Oleh sebab itu, Tuvalu aktif dalam melakukan negosiasi perubahan iklim sebagai bukti nyata dalam membawa aspirasi mereka terkait perubahan iklim yang mengancam keberlangsungan hidup sebagai suatu negara. Tuvalu aktif dalam Pacific Islands Forum (PIF) yang merupakan kerjasama antara sesama negara di kawasan Kepulauan Pasifik dan juga aktif dalam United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (Andryani and Siubelan, 2015).

Salah satu agenda dalam UNFCCC adalah Paris Agreement dan Intended Nationally Determined Contributions (INDC) adalah pilar fundamental dalam Paris Agreement sehingga Tuvalu melakukan diplomasi dalam Paris Agreement melalui INDC yang merujuk kepada Mitigasi dan mengutamakan keberlangsungan hidup negara-negara terancam krisis iklim yakni dengan berisi komitmen dalam pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor pembangkit listrik sebesar 100% yakni mencapai nol emisi pada tahun 2025, target ekonomi terkuantifikasi indikatif untuk pengurangan emisi GRK dari seluruh sektor energi hingga 60% pada tahun 2025 (Government of Tuvalu, 2015).

Mengakui bahwa perubahan Iklim merupakan keprihatinan bersama umat manusia, dan mengerahkan seluruh anggota Conference of

the Parties (COP) untuk turut berpartisipasi nyata dalam menangani perubahan iklim, maka dalam Paris Agreement pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa “untuk mencapai tujuan suhu jangka panjang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2, para pihak berketetapan untuk mencapai titik puncak emisi gas rumah kaca global secepat mungkin, mengakui bahwa pencapaian titik puncak bagi para pihak dari negara berkembang membutuhkan waktu lebih lama, dan segera setelah itu semua pihak akan melakukan upaya penurunan emisi gas secara cepat sesuai dengan ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia sehingga mencapai keseimbangan antara emisi dari sumber antropogenik dan serapan dari resor gas rumah kaca pada pertengahan kedua abad ini, berdasarkan prinsip keadilan, dan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya untuk menghapus kemiskinan” (Bilqis and Afriansyah, 2019).

Dalam ayat ini hanya ditekankan ‘secepat mungkin’ tanpa memberikan jenjang waktu yang lebih rinci dan pasti. Sedangkan negara terancam perubahan iklim seperti Tuvalu membutuhkan komitmen nyata dari UNFCCC dalam memerangi ancaman perubahan iklim secara spesifik. Oleh sebab itu efektivitas diplomasi lingkungan Tuvalu menjadi fokus dalam penelitian ini sebab bagaimana komitmen dari COP dapat terealisasi secara nyata juga didukung oleh efektif atau tidaknya diplomasi lingkungan yang dibawa Tuvalu di dalam UNFCCC demi kelanjutan hidup dan masa depan warga dan bangsanya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melihat bahwa efektivitas diplomasi lingkungan sangat berperan penting bagi Tuvalu dalam mencapai diplomasi lingkungan, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

“Bagaimana efektivitas diplomasi lingkungan Tuvalu di dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Menjawab bagaimana efektivitas diplomasi lingkungan Tuvalu di dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB dalam menanggapi Perubahan Iklim, maka penulis menemukan beberapa poin sebagai tujuan penelitian dalam skripsi ini yakni:

1. Ingin mengetahui sejauh mana upaya diplomasi lingkungan Tuvalu melalui Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB
2. Melihat efektivitas dalam diplomasi lingkungan Tuvalu Untuk mencapai politik lingkungannya
3. Timbal balik apa yang diperoleh Tuvalu dalam menjalankan diplomasi lingkungan pada Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB secara efektif

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepekaan serta kesadaran akan Isu Lingkungan yang tidak lagi dapat diremehkan
2. Penelitian ini diharapkan dapat turut memberikan sumbangsih bagi pengembangan studi Hubungan Internasional
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam studi Hubungan Internasional serta bagi para pemerhati lingkungan

## **1.5 Sistematika Bab**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika bab.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan jenis dan metode penelitian apa yang akan penulis gunakan untuk mengumpulkan data dan teknik analisis data serta variabel penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan Bagaimana efektivitas diplomasi lingkungan Tuvalu di dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB dalam menanggapi Perubahan Iklim serta apa saja yang menjadi tantangan maupun pendukung dalam mewujudkan kepentingan Tuvalu terhadap lingkungan.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan kesimpulan yang didapatkan sekaligus akan mengemukakan saran yang peneliti temukan selama pengerjaan topik skripsi ini.